

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka kesimpulan dari Manajemen Strategi Dalam Inovasi Pelayanan Publik Melalui Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Banyumas adalah :

1. Aspek Perencanaan (*planning*): Aspek perencanaan dalam implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan secara sistematis, terarah dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Perencanaan tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penetapan target kinerja, tetapi juga melalui penentuan sasaran program yang jelas serta integrasi capaian ke dalam perjanjian kinerja pegawai. Langkah ini menunjukkan adanya keselarasan antara kebijakan strategis dan pelaksanaan teknis di lapangan. Dengan perencanaan yang terstruktur, setiap tahapan program memiliki pedoman kerja yang pasti sehingga mampu meminimalisir potensi kesalahan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan. Selain itu, perencanaan juga mencakup kesiapan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur yang memadai. Pelatihan teknis bagi petugas sebelum terjun ke lapangan, pembagian tugas yang jelas serta penunjukan operator di tingkat desa dan kecamatan menjadi bagian dari strategi untuk menjamin keberlanjutan pelayanan. Analisis terhadap kebutuhan perangkat dan jaringan internet turut memperkuat implementasi program. Dengan demikian, perencanaan dalam program IKD tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kuantitatif, tetapi juga menekankan pada kesiapan operasional dan kualitas pelayanan, sehingga inovasi pelayanan publik dapat berjalan secara baik dan berkelanjutan.
2. Aspek Pengorganisasian (*organizing*): Fungsi pengorganisasian dalam implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai dengan prinsip manajemen yang efektif. Pembagian tugas antarbidang yang jelas, pembentukan tim khusus aktivasi serta adanya spesialisasi kerja menunjukkan bahwa organisasi telah dirancang secara fungsional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program. Setiap unit memiliki peran yang saling

melengkapi, mulai dari pelaksanaan teknis, penjaminan validitas data dan sistem, hingga dukungan administrasi dan sarana prasarana. Selain itu, pola koordinasi berjenjang dari tingkat kabupaten hingga desa memperlihatkan adanya mekanisme kerja yang terintegrasi dan berkesinambungan. Pelibatan operator kecamatan dan desa sebagai perpanjangan tangan di wilayah masing-masing memperkuat efektivitas komunikasi serta memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pengorganisasian yang tertata dan kolaboratif tersebut, implementasi program IKD di Kabupaten Banyumas dapat berjalan secara lebih baik, terkoordinasi dan mampu menjangkau sasaran secara merata.

3. Aspek Pelaksanaan (*actuating*): Dalam pelaksanaan manajemen strategi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Banyumas telah dijalankan secara aktif dan terarah. Pelaksanaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan aktivasi secara langsung, tetapi juga melalui pendekatan jemput bola yang memungkinkan pelayanan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keterlibatan petugas yang telah diberikan pelatihan teknis, pendampingan personal dalam proses aktivasi serta pemanfaatan media digital menunjukkan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya menjalin kerja sama lintas instansi dalam mengintegrasikan IKD sebagai bagian dari persyaratan administrasi juga memperlihatkan adanya orientasi jangka panjang dalam pelaksanaan program. Kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah menjadi langkah strategis untuk memperluas manfaat IKD dalam berbagai layanan publik.
4. Aspek Pengawasan (*controlling*): Dalam aspek pengawasan, implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan capaian berbasis data, pelaporan rutin serta evaluasi internal yang membahas perkembangan target dan kendala di lapangan. Perbandingan data aktivasi antar tahun menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, sehingga dapat menjadi indikator bahwa proses monitoring dan evaluasi

berjalan efektif dalam mengarahkan pelaksanaan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan juga tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup responsivitas terhadap kendala yang dihadapi masyarakat. Tindak lanjut yang cepat atas permasalahan teknis serta penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi memperlihatkan adanya komitmen untuk menjaga kualitas pelayanan. Dengan mekanisme pengawasan yang sistematis tersebut, pelaksanaan program IKD di Kabupaten Banyumas dapat terus diperbaiki dan dikembangkan guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berbasis digital.

SARAN

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan program Identitas Kependudukan Digital (IKD), diperlukan langkah penguatan dalam aspek sosialisasi, pendampingan teknis serta peningkatan kesiapan sumber daya manusia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat agar pemahaman mengenai manfaat dan cara penggunaan IKD semakin meningkat. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas pelayanan juga penting dilakukan agar proses aktivasi dapat berjalan lebih efektif serta mampu mengatasi kendala yang muncul di lapangan. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan implementasi IKD dapat berlangsung secara optimal dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara digital.